

STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN 2020



STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN 2020



STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN 2020

No. ISBN : 978-623-6248-12-6
No. Publikasi : 33050.2147
Katalog BPS : 4301002.3305

Ukuran Buku : 18 cm x 26 cm
Jumlah Halaman : xii + 50 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Diterbitkan oleh :
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Dicetak oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab:

Kus Haryono, S.ST., M.Si.

Penyunting:

Yuddy Kristian, S.ST., M.Stat.

Penulis:

Desilia Wimbi Susanti, S.ST., M.Stat.

Pengolah data:

Desilia Wimbi Susanti, S.ST., M.Stat.

Pembuat Infografis:

Desilia Wimbi Susanti, S.ST., M.Stat.

Pembuat Kover:

Desilia Wimbi Susanti, S.ST., M.Stat.

<https://webumkmkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Pendidikan menjadi salah satu kunci dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari 7 agenda pembangunan nasional 2020-2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter.

Statistik Pendidikan Kabupaten Kebumen 2020 menggambarkan kondisi pendidikan di Kabupaten Kebumen berdasarkan hasil Susenas Maret 2020. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan. Selain itu juga disajikan data hasil registrasi sekolah yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun Ajaran 2019/2020. Data ini memuat informasi mengenai jumlah sekolah, peserta didik, dan jumlah guru.

Dengan adanya publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan di bidang pendidikan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang pendidikan

Kebumen, Agustus 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kebumen,



Kus Haryono, S.ST, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Bab I Pendahuluan	3
Pembangunan Pendidikan	3
Data Pendidikan untuk Pembangunan	6
Bab II Sarana Penunjang Pendidikan	7
Jumlah Sekolah dan Peserta Didik	8
Beban Kerja Guru	11
Penggunaan Internet	13
Biaya Pendidikan	18
Bantuan Pendidikan	19
Bab III Partisipasi Sekolah	21
Pendidikan Anak Usia Dini	21
Partisipasi Sekolah	23
Angka Partisipasi Kasar	26
Angka Partisipasi Murni	29
Bab IV Hasil dan Capaian Proses Pendidikan	33
Angka Melek Huruf	33
Tingkat Pendidikan	36
Rata-rata Lama Sekolah	38
Daftar Pustaka	41
Catatan Teknis	43

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kebumen pada Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020	8
2.2 Jumlah Peserta Didik Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kebumen pada tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020	10
2.3 Jumlah Murid, Guru, Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kebumen, Tahun Ajaran 2019/2020	12
2.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah yang Menggunakan Internet Selama 3 Bulan Terakhir, Kabupaten Kebumen, 2020	14
2.5 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Biaya Pendidikan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengeluaran Pendidikan, Kabupaten Kebumen, 2020 (000 Rupiah)	19
2.6 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Bulan Agustus 2019-Februari 2020 Menurut Tipe Daerah dan Jenis PIP, Kabupaten Kebumen, 2020	20
3.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun menurut Tipe Daerah dan Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah, Kabupaten Kebumen, 2020	22
3.2 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah, Kabupaten Kebumen, 2020	24

Tabel	Halaman
3.3 Angka Partisipasi Sekolah, Kabupaten Kebumen, 2020	26
3.4 Angka Partisipasi Kasar, Kabupaten Kebumen, 2020	27
3.5 Angka Partisipasi Murni, Kabupaten Kebumen, 2020	30
3.6 Rasio APM, Kabupaten Kebumen, 2020	31
4.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik, Kabupaten Kebumen, 2020	35
4.2 Rasio Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah, Kabupaten Kebumen, 2020	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Persentase Sekolah Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kebumen pada Tahun Ajaran 2019/2020	9
2.2 Persentase Peserta Didik Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kebumen pada Tahun Ajaran 2019/2020	11
2.3 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah yang Menggunakan Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Media yang Digunakan, Kabupaten Kebumen, 2020	15
2.4 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah yang Menggunakan Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Tujuan Menggunakan Internet, Kabupaten Kebumen, 2020	17
3.1 APK Menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Kebumen, 2016-2020	28
3.2 APM Menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Kebumen, 2016-2020	29
4.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, 2018-2020	34
4.2 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%), Kabupaten Kebumen, 2020	37

Gambar	Halaman
4.3 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%) Menurut Tipe Daerah, Kabupaten Kebumen, 2020	37
4.4 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%) Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Kebumen, 2020	38
4.5 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas, Kabupaten Kebumen, 2016-2020	39

STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN 2020



98,51% penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah mengakses internet dengan menggunakan HP/Ponsel.

Literasi Digital

DOWNLOAD



70% penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah mengakses internet.



67,67% penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah mengakses internet untuk mendapatkan informasi untuk proses pembelajaran.



86,06% penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah mengakses internet dengan tujuan untuk hiburan.



Angka Partisipasi Sekolah

terbesar berada pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu **99,58 persen**.



20,16 persen penduduk usia 16-18 tahun tidak bersekolah lagi.

Selama 5 tahun terakhir, Rata-rata Lama Sekolah mengalami **peningkatan**.

Bab 1. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pernyataan tersebut dipertegas pada Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2 kemudian menekankan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan di negara Indonesia. Bagaimana tidak, karena setiap permasalahan yang ada salah satu kunci penyelesaiannya adalah dengan pendidikan. Seperti misalnya kemiskinan, agar masyarakat dapat keluar dari lingkaran kemiskinan, salah satu jalan keluarnya adalah melalui pendidikan. Dengan semakin tingginya pendidikan yang ditempuh, maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan semakin besar, sehingga peluang memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga semakin besar. Meskipun bukan jalan yang singkat untuk dapat dilalui namun merupakan salah satu bekal yang bisa diandalkan dan secara tidak langsung menjadi modal pembangunan bagi negara.

Pembangunan Pendidikan

Pendidikan tidak hanya menjadi salah satu isu di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu isu yang disorot dunia. Oleh karena itu bidang ini menjadi satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tepatnya Tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. RPJMN 2020-2024 tersebut merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pendidikan menjadi bagian dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari 7 agenda pembangunan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Fokus utama pembangunan pendidikan pada RPJMN 2020-2024 masih kepada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Tingkat pendidikan masyarakat telah membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi masih menjadi permasalahan dan semakinlebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Kesenjangan pendidikan juga masih tinggi apabila dibandingkan antarwilayah. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sayangnya, upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*).

Salah satu tantangan dalam pembangunan pendidikan sebagaimana yang diulas dalam narasi RPJMN 2020-2024 adalah adanya

revolusi industri 4.0. Semakin berkembangnya teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam membantu proses pembangunan di bidang pendidikan yaitu melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*). Hal ini sangat diperlukan mengingat adanya pandemi COVID-19 yang terjadi secara global, termasuk di Indonesia yang terjadi sejak awal Maret tahun 2020. Sejumlah tindakan pencegahan diinstruksikan kepada sekolah maupun perguruan tinggi untuk mencegah penyebaran COVID-19 sebagaimana tertera dalam Surat Edaran Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan. Termasuk diantaranya meningkatkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS), mencuci tangan pakai sabun (CTPS), serta menjaga jarak khususnya untuk sekolah yang berada di wilayah dengan tingkat resiko penyebaran virus COVID-19 yang tinggi.

Semakin tingginya jumlah kasus positif COVID-19 menuntut pemerintah khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengambil beberapa kebijakan pendidikan diantaranya proses belajar siswa dilakukan di rumah melalui pembelajaran jarak jauh, mekanisme penerimaan peserta didik baru harus mengikuti protokol kesehatan dan jika bisa dilakukan secara online, dan dana bantuan operasional sekolah dapat digunakan untuk membiayai keperluan pencegahan pandemi COVID-19. Selain itu kenaikan kelas dan kelulusan ditentukan berdasarkan nilai rapor, serta dibatalkannya Ujian Nasional (UN) tahun 2020 sehingga keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020). Pendidikan memang sangat penting bagi kemajuan generasi penerus bangsa, namun faktor kesehatan juga tetap harus diutamakan demi keberlangsungan masa depan bangsa.

Data Pendidikan untuk Pembangunan

Informasi yang lengkap dan akurat diperlukan sebagai acuan untuk perencanaan serta penentuan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjelaskan situasi serta kondisi pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini. Beberapa indikator disajikan dalam bentuk buku publikasi “Statistik Pendidikan Kabupaten Kebumen 2020” sebagai gambaran dari situasi, kondisi, serta capaian pembangunan Kabupaten Kebumen di bidang pendidikan.

Secara umum, publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai pendidikan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2020. Selain itu juga digunakan data sekunder dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2019/2020. Data-data tersebut disajikan dengan disagregasi menurut jenis kelamin dan wilayah sehingga diharapkan mampu menggambarkan pemerataan pendidikan. Pembahasan utama publikasi ini dirinci ke dalam empat bab. Bab pertama berisi pembangunan pendidikan serta pentingnya data pendidikan bagi pembangunan. Bab kedua menyajikan pembahasan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi unsur penunjang peningkatan kualitas pendidikan yang mencakup akses siswa terhadap teknologi dan informasi, biaya pendidikan, dan beasiswa/bantuan pendidikan. Bab ketiga pembahasan mengenai partisipasi pendidikan menurut jenjang pendidikan. Bab keempat membahas tentang hasil dan capaian proses pendidikan yang ditunjukkan melalui beberapa indikator antara lain Angka Melek Huruf, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan Rata-rata Lama Sekolah.

Bab 2. Sarana Penunjang Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana dan prasarana pendidikan harus tersedia semaksimal mungkin guna mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar, agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman dan tanpa ada kendala.

Di era digital saat ini, internet merupakan salah satu sarana pendidikan yang dapat mendukung proses belajar mengajar. Internet dapat digunakan sebagai sumber informasi yang sangat besar dalam dunia pendidikan.

Gambaran faktor internal rumah tangga dalam upaya memperoleh pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara akan dibahas pada bab ini, dimulai dari kemudahan penduduk dalam mengakses pendidikan baik dari aspek penggunaan internet, biaya pendidikan, maupun bantuan pendidikan yang diterima rumah tangga.

Jumlah Sekolah dan Peserta Didik

Peningkatan akses layanan pendidikan selalu diupayakan oleh pemerintah dalam rangka optimalisasi layanan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Salah satu upaya yang cukup terasa dalam beberapa tahun terakhir adalah kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru. Sejak tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kebijakan tersebut dilakukan sebagai salah satu strategi percepatan pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan. Pemanfaatan zonasi nantinya akan diperluas untuk pemenuhan sarana prasarana, redistribusi dan pembinaan guru, serta pembinaan kesiswaan.

Tabel 2.1 Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kebumen pada Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020

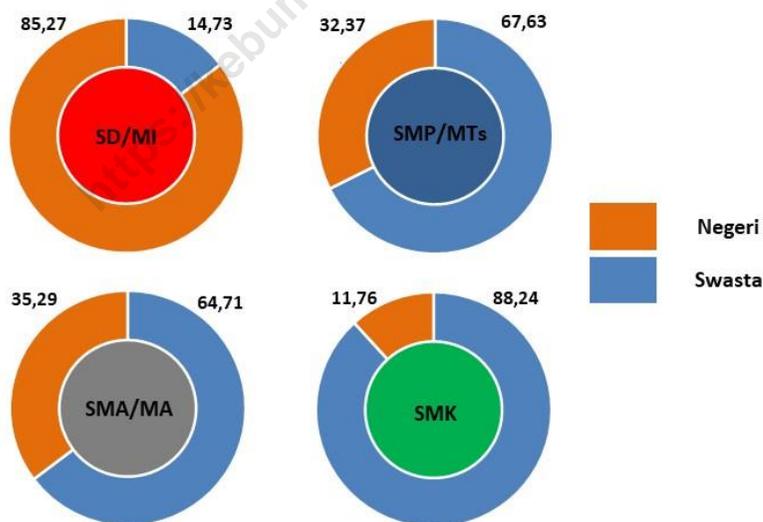
Jenjang Pendidikan	Negeri		Swasta		Total	
	2018/2019	2019/2020	2018/2019	2019/2020	2018/2019	2019/2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI	770	770	130	133	912	903
SMP/MTs	67	67	138	140	205	207
SMA/MA	18	18	33	33	51	51
SMK	8	8	58	60	66	68

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah dari Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2020

Berdasarkan Tabel 2.1, terlihat bahwa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki pertumbuhan jumlah sekolah yang paling positif di antara jenjang sekolah lainnya yaitu sebesar 0,98 persen untuk jenjang SMP/MTs dan 3,03 persen untuk jenjang SMK. Hal tersebut disinyalir karena meningkatnya jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dan juga semakin tingginya minat untuk melanjutkan ke jenjang SMK.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, penyelenggara pendidikan di Indonesia bukan hanya sebatas pemerintah saja, melainkan juga dapat melibatkan masyarakat (swasta) untuk memberikan kontribusinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Gambar 2.1 memperlihatkan bahwa kontribusi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kebumen cukup tinggi, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Persentase jumlah SMP/MTs negeri dibandingkan swasta sangat jauh perbedaannya yaitu 32,27 persen berbanding 67,63 persen, persentase jumlah SMA/MA negeri dibandingkan swasta perbedaannya yaitu 35,29 persen dibanding 64,71 persen, sedangkan persentase jumlah SMK negeri dibandingkan swasta perbedaannya yaitu 11,76 persen dibanding 88,24 persen.

Gambar 2.1 Persentase Sekolah Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kebumen pada Tahun Ajaran 2019/2020



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah dari Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2020

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa peserta didik SMK lebih banyak jika dibandingkan dengan peserta didik SMA (sekitar 38 ribu siswa berbanding 17 ribu siswa). Hal tersebut menggambarkan tingginya minat peserta didik untuk melanjutkan ke sekolah kejuruan. Langkah ini diharapkan dapat menjawab keinginan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja melalui lulusan-lulusan SMK sebagai tenaga kerja terampil dan memiliki daya saing dalam dunia kerja.

Tabel 2.2 Jumlah Peserta Didik Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kebumen pada Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020

Jenjang Pendidikan	Negeri		Swasta		Total	
	2018/2019	2019/2020	2018/2019	2019/2020	2018/2019	2019/2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI	108.492	107.200	20.589	21.248	129.081	128.448
SMP/MTs	41.123	40.644	20.326	20.659	61.449	61.303
SMA/MA	12.590	13.196	3.734	3.747	16.324	16.943
SMK	10.384	10.465	27.490	27.822	37.874	38.287

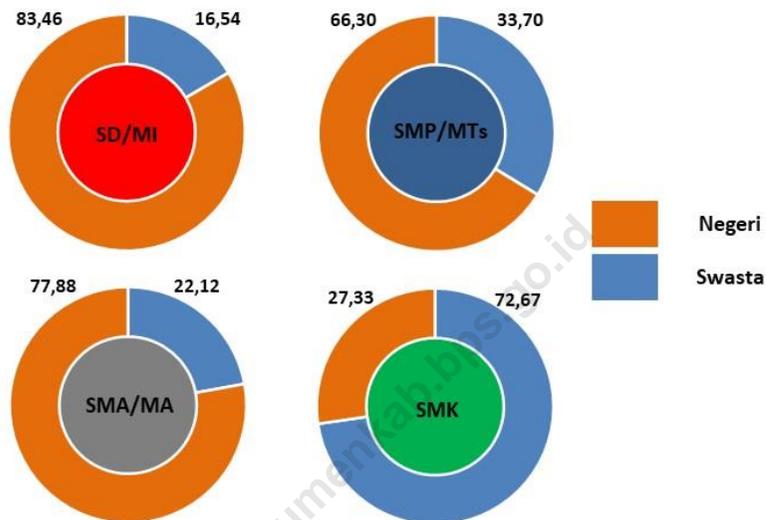
Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah dari Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2020

Sebagian besar peserta didik bersekolah pada sekolah negeri daripada swasta. Pertimbangan biaya sekolah yang lebih rendah karena telah mendapatkan subsidi dari pemerintah menjadi salah satu daya tarik dari sekolah negeri. Peserta didik di sekolah negeri pada jenjang SD, SMP, dan SMA lebih didominasi oleh sekolah negeri, sedangkan jenjang SMK didominasi oleh sekolah swasta (Gambar 2.2).

Hal yang cukup menarik terlihat pada distribusi peserta didik di jenjang pendidikan SMA. Meskipun distribusi jumlah sekolah negeri lebih kecil daripada jumlah sekolah swasta (Gambar 2.1), namun distribusi jumlah peserta didik menunjukkan adanya kecenderungan sebaliknya dimana jumlah peserta didik SMA negeri lebih besar daripada swasta yaitu 77,88 persen berbanding 22,12 persen (Gambar 2.2). Hal itu menandakan bahwa walaupun jumlah SMA swasta sudah mengungguli

jumlah SMA negeri, namun daya tampung peserta didik SMA swasta belum setara dengan daya tampung SMA negeri.

Gambar 2.2 Persentase Peserta Didik Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kebumen pada Tahun Ajaran 2019/2020



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah dari Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2020

Beban Kerja Guru

Salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan adalah rasio murid-guru. Angka ini mencerminkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru dalam sebuah sekolah, berarti semakin mengurangi efektivitas proses pembelajaran karena tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid menjadi berkurang sehingga mutu pengajaran cenderung lebih rendah.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Tabel 2.3 menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA, rasio murid guru masih di bawah standar ideal. Sementara itu, pada jenjang SMK rasio murid-guru sudah di atas rasio ideal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 2.3 Jumlah Murid, Guru, Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kebumen, Tahun Ajaran 2019/2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI	128.448	7.876	16
SMP/MTs	61.303	3.868	16
SMA/MA	16.943	1.142	15
SMK	38.287	2.203	19

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah dari Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2020

Rasio murid-guru bukanlah faktor mutlak keberhasilan anak dalam proses belajar. Rasio murid-guru yang ideal akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Rasio murid-guru di kelas tentunya akan memengaruhi manajemen kelas, proses belajar di kelas, tapi bukan satu satunya faktor penentu untuk meningkatkan kualitas belajar di kelas. Keterampilan dan pengalaman guru juga perlu dipertimbangkan karena guru yang lebih terampil dan berpengalaman, misalnya, mungkin bisa menangani kelas yang lebih besar daripada yang kurang berpengalaman.

Penggunaan Internet

Sebelum adanya internet, salah satu masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan (di semua negara) adalah akses kepada sumber informasi. Dengan adanya internet, kita bisa mengakses informasi sebanyak-banyaknya, baik informasi berupa artikel, gambar, ataupun video.

Di era modern saat ini, internet sudah menjadi salah satu media yang sangat penting bagi setiap orang dalam memperluas wawasan yang dimilikinya. Manfaat internet sekarang sudah dapat dirasakan oleh berbagai kalangan. Internet sebagai salah satu media terbesar di dunia bisa digunakan sebagai pendorong majunya pendidikan masa depan. Kehadiran internet bukanlah pengganti sistem pendidikan melainkan lebih bersifat penambah dan pelengkap.

Selain memberikan manfaat, internet juga dapat memberikan dampak yang buruk. Hal ini dikarenakan internet tidak hanya menyajikan informasi-informasi positif saja, namun juga informasi-informasi yang bersifat negatif. Oleh karena itu, penggunaan internet pada penduduk usia sekolah sebaiknya mendapat pengawasan dari orang tua maupun lingkungan sekitarnya.

Tabel 2.4 memperlihatkan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah dan mengakses internet selama 3 bulan terakhir, termasuk menggunakan internet untuk melakukan akses ke *facebook*, *twitter*, *BBM*, dan *whatsapp*. Tujuh puluh persen penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah (siswa/mahasiswa) mengakses internet.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah yang Menggunakan Internet Selama 3 Bulan Terakhir, Kabupaten Kebumen, 2020

Karakteristik Demografi	Akses Internet		Jumlah
	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	70,25	29,75	100,00
Tipe Daerah			
Perkotaan	73,01	26,99	100,00
Perdesaan	68,93	31,07	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	68,94	31,06	100,00
Perempuan	71,60	28,40	100,00
Jenjang Pendidikan			
SD/Sederajat	49,30	50,70	100,00
SMP/Sederajat	82,37	17,63	100,00
SM/Sederajat	94,74	5,26	100,00
PT	100,00	0,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tujuh dari sepuluh siswa di perdesaan telah mengakses internet, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang tinggal di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mengakses internet juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana teknologi yang memberikan kemudahan dalam mengakses internet di perkotaan daripada di perdesaan.

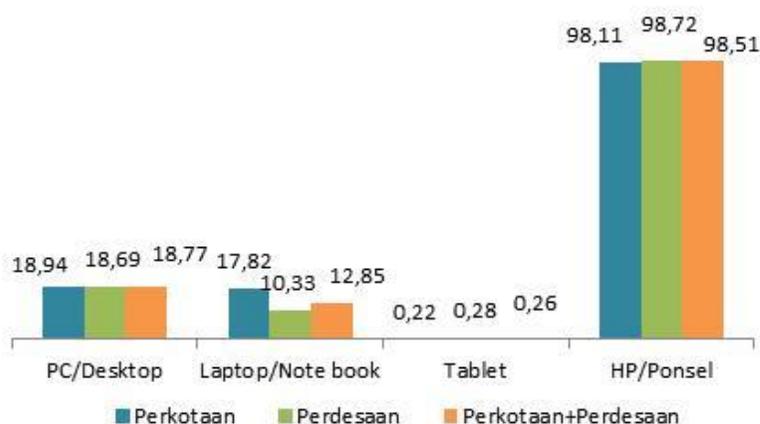
Internet masa kini telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat Indonesia baik di perkotaan maupun di perdesaan. Keberadaannya seperti sudah menjadi makanan harian bagi sebagian penduduk dan setiap harinya pula pengguna fasilitas internet di Indonesia semakin meningkat.

Secara umum, pola penggunaan internet di daerah perkotaan maupun perdesaan sudah hampir sama. Penggunaan internet tak selamanya hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan yang dalam segi

perkembangan teknologi bisa dikatakan lebih maju dibandingkan masyarakat perdesaan. Saat ini sebagian masyarakat perdesaan dapat mengakses internet dengan menggunakan handphone pribadinya, dengan fasilitas mobile internet. Sehingga kini ungkapan dunia dalam genggaman berlaku pula untuk masyarakat perdesaan.

Selain itu, Tabel 2.4 juga menunjukkan tujuh dari sepuluh siswa/mahasiswa berusia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah dan mengakses internet selama 3 bulan terakhir berdasarkan hasil Susenas 2020. Seiring meningkatnya jenjang pendidikan, persentase siswa yang mengakses internet semakin meningkat. Lima dari sepuluh siswa SD/MI sudah mengakses internet. Sementara itu, dikarenakan mahasiswa di perguruan tinggi dituntut untuk selalu mengembangkan potensi dan mengikuti perkembangan zaman, serta sebagian materi perkuliahan juga bisa diperoleh dengan menggunakan akses dari internet, seluruh mahasiswa di PT mengakses internet selama tiga bulan terakhir. Dengan demikian, kebutuhan akses internet meningkat seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

Gambar 2.3 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah yang Menggunakan Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Media yang Digunakan, Kabupaten Kebumen, 2020



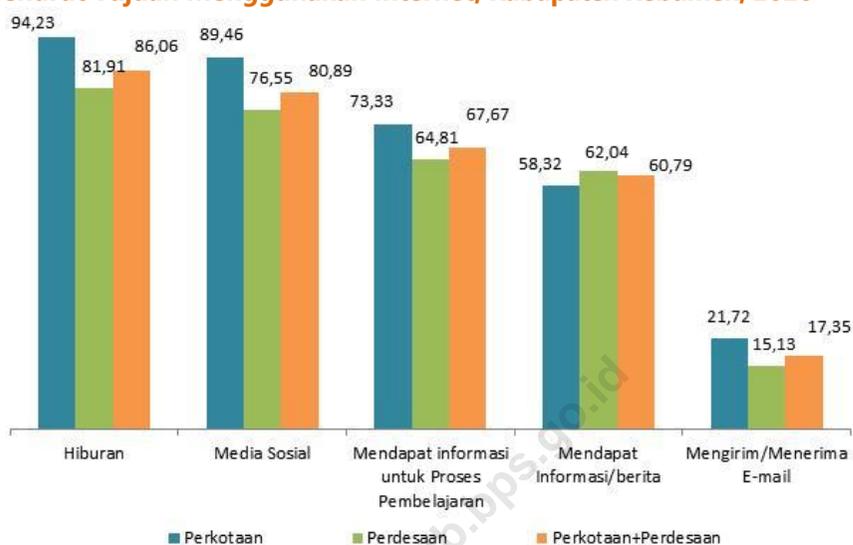
Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Dalam mengakses internet, tidak ada perbedaan media yang digunakan oleh siswa di perdesaan ataupun perkotaan dalam mengakses internet seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3. Penggunaan internet juga sudah menjadi wilayah pribadi di kalangan siswa, hampir semua siswa mengakses internet melalui HP/Ponsel. Perkembangan teknologi digital dari tahun ke tahun berkembang begitu cepat, semakin canggih dan efisien sehingga menghasilkan produk-produk gadget yang canggih dan inovatif baik dari sisi perangkat keras maupun lunak. Harga gadget semakin murah dengan fitur yang memanjakan pengguna. Hal inilah yang mendorong penggunaan gadget semakin umum di kalangan masyarakat termasuk para siswa.

Pada era digital saat ini, internet sangat diperlukan bagi siswa/mahasiswa tidak hanya untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tetapi juga sebagai media mencari informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah, sebagai sumber pengetahuan alternatif, sarana hiburan ringan melalui film/music/game, mencari teman (baru dan lama) atau sekedar berkomunikasi melalui medsos, belajar bisnis online, dan meningkatkan kreatifitas.

Pencarian informasi yang dilakukan sering didorong oleh tugas-tugas sekolah, sedangkan penggunaan media sosial dan konten hiburan didorong oleh kebutuhan pribadi. Dengan adanya internet, memungkinkan siswa/mahasiswa untuk tukar- menukar informasi atau tanya jawab dengan guru, dosen atau pakar dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Selain itu, bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian maupun tugas akhir, bisa memperoleh maupun tukar- menukar data melalui internet (email atau *file sharing*), mengakses perpustakaan di perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri (*digital library*) dengan mudah.

Gambar 2.4 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah yang Menggunakan Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Tujuan Menggunakan Internet, Kabupaten Kebumen, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Gambar 2.4 menunjukkan bahwa secara umum hiburan dan media sosial (medsos) merupakan tujuan terbanyak siswa dalam mengakses internet, meskipun sudah separuh lebih siswa juga mengakses internet untuk mendapatkan informasi untuk proses pembelajaran dan juga untuk mendapatkan berita dan informasi. Sementara itu, hanya 2 dari 10 siswa yang mengakses internet untuk mengirim atau menerima surat elektronik/*e-mail*. Dilihat dari tipe daerah tempat tinggalnya, tujuan akses internet siswa di perkotaan dan perdesaan secara umum hampir sama.

Meskipun akses siswa terhadap konten pembelajaran sudah menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, namun jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan akses siswa terhadap medsos dan hiburan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi dunia pendidikan, untuk terus melakukan evaluasi agar metode pembelajaran menjadi lebih selaras dengan perkembangan teknologi sekarang ini sehingga lebih inovatif, menarik dan memacu kreativitas siswa.

Biaya Pendidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa, berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Biaya pendidikan yang dicakup dalam Susenas merupakan keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh penduduk yang masih bersekolah untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi:

- i) Biaya pendaftaran, yaitu uang pangkal/gedung/daftar ulang;
- ii) biaya operasional, terdiri atas uang SPP, Komite Sekolah, praktikum/keterampilan, iuran OSIS, evaluasi/ujian, bahan penunjang mata pelajaran, seragam sekolah dan olah raga, buku pelajaran/panduan/diktat, lembar kerja siswa, alat tulis dan perlengkapannya, kursus yang diselenggarakan sekolah, dan atau biaya rutin operasional pendidikan lainnya;
- iii) biaya transportasi dan uang saku.

Uang sekolah (SPP/UKT) dan iuran komite sekolah merupakan biaya pendidikan terbesar yang harus dikeluarkan oleh rumahtangga untuk tiap siswa setiap bulannya. Biaya pendidikan per siswa per bulan untuk jenis pengeluaran ini sebesar 18,10 ribu rupiah. Secara keseluruhan, biaya pendidikan di perkotaan lebih tinggi dibanding di perdesaan. Hal ini dimungkinkan karena kelengkapan fasilitas yang dimiliki, serta keberadaan sekolah swasta yang notabene lebih banyak di perkotaan.

Tabel 2.5 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Biaya Pendidikan menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengeluaran Pendidikan, Kabupaten Kebumen, 2020 (000 Rupiah)

Jenis Pengeluaran (000 Rupiah)	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumbangan pembangunan sekolah	10,19	6,54	7,70
Uang sekolah (SPP/UKT) dan iuran komite sekolah	17,26	18,50	18,10
Iuran sekolah lainnya	3,02	2,51	2,67
Buku pelajaran, <i>foto copy</i> , bahan pelajaran	1,95	1,96	1,96
Alat-alat tulis	1,26	1,40	1,36
Uang kursus	3,81	2,05	2,61
Total	37,50	32,95	34,40

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Bantuan Pendidikan

Bantuan Pendidikan merupakan pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang dikeluarkan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) setelah

selesainya pendidikan.

Rumah tangga penerima bantuan pendidikan PIP (Program Indonesia Pintar) di Kabupaten Kebumen sebesar 19,60 persen (Tabel 2.6). Persentase rumah tangga penerima bantuan PIP di daerah perdesaan (20,03 persen) sedikit lebih tinggi dibanding daerah perkotaan (19,41 persen).

Tabel 2.6 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dalam bulan Agustus 2019 – Februari 2020 menurut Tipe Daerah dan Jenis PIP, Kabupaten Kebumen, 2020

Jenis PIP	Tipe Daerah		
	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan + Perkotaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	20,03	19,41	19,60
PIP SD/Sederajat	13,42	12,78	12,97
PIP SMP/Sederajat	4,18	6,38	5,70
PIP SM/Sederajat	6,92	5,22	5,74

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Rumah tangga yang menerima bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) paling banyak pada tingkat SD/ sederajat, sebagai salah satu bagian alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN yang merupakan komitmen Pemerintah dalam program wajib belajar 9 tahun.

Bab 3. Partisipasi Sekolah

Cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Pemenuhan hak pendidikan yang berkualitas tercermin dari sejauh manapencapaian partisipasi sekolah setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, ras, tempat tinggal, termasuk juga penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan prinsip *"No one left behind"* dalam SDGs. Negara harus memastikan bahwa tidak ada satupun warganya yang tertinggal, terlupakan, atau terpinggirkan dari haknya untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Dengan demikian, tujuan ke-4 SDGs "terjaminnya kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua" dapat tercapai.

Susenas 2020 menyajikan hasil perhitungan berbagai indikator pencapaian dalam bidang pendidikan, termasuk indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Indikator partisipasi sekolah tersebut dapat menjadi alat untuk memantau efektivitas program pendidikan dari pemerintah dan melihat capaian target pembangunan pendidikan.

Pendidikan Anak Usia Dini

Periode usia dini merupakan periode emas perkembangan anak. Anak akan tumbuh dan berkembang dalam aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, dan bahasa melalui interaksinya dengan keluarga dan lingkungan. Masa keemasan tersebut tidak dapat diulang kembali pada masa-masa berikutnya. Oleh karena itu, jika potensi yang

dimiliki oleh anak tidak distimulasi secara optimal dan maksimal pada usia dini, dikhawatirkan dapat menghambat tahap perkembangan selanjutnya. Keluarga, masyarakat, dan bangsa akan sangat merugi jika mengabaikan masa-masa penting pada anak usia dini tersebut.

Sebagai suatu komitmen dalam memaksimalkan perkembangan anak usia dini di Indonesia, pemerintah mencanangkan program pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini. Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Layanan pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan antara lain berbentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) (Pemendikbud No 137 Tahun 2014).

Tabel 3.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun menurut Tipe Daerah dan Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah, Kabupaten Kebumen, 2020

Tipe Daerah	Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah (%)				Total
	Masih mengikuti Pendidikan pra sekolah tahun ajaran 2019/2020	Pernah mengikuti Pendidikan pra sekolah tahun ajaran 2019/2020	Pernah mengikuti Pendidikan pra sekolah sebelum tahun ajaran 2019/2020	Tidak/belum pernah mengikuti Pendidikan pra sekolah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan+Perdesaan	29,44	1,03	5,89	63,63	100,00
Perkotaan	32,08	2,52	7,35	58,06	100,00
Perdesaan	28,14	0,29	5,17	66,40	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Pada tahun 2020, secara umum partisipasi anak usia 0-6 tahun yang mengikuti pendidikan pra sekolah mencapai 36,37 persen. Berdasarkan tipe daerah, terjadi kesenjangan dan perbedaan untuk partisipasi pendidikan prasekolah. Partisipasi prasekolah di perkotaan (41,94 persen) lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (33,60 persen) dengan selisih 8,34 persen poin. Hal ini menunjukkan masih perlunya upaya pemerintah Kabupaten Kebumen untuk terus meningkatkan pemerataan akses pendidikan prasekolah.

Partisipasi Sekolah

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkomitmen dalam agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, salah satunya yaitu melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Bentuk peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dapat dilihat dari persentase partisipasi sekolah penduduk. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Pada Tabel 3.2 terlihat bahwa pada tahun 2020 persentase penduduk 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 5,85 persen, yang masih bersekolah sebesar 23,71 persen, dan yang tidak bersekolah lagi sebesar 70,40 persen. Persentase penduduk laki-laki yang belum/tidak pernah bersekolah sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah, Kabupaten Kebumen, 2020

Karakteristik Demografi	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	5,85	23,75	70,40
Jenis Kelamin			
Laki-laki	5,90	24,17	69,93
Perempuan	5,79	23,36	70,85
Kelompok Umur			
5	100	0,00	0,00
6	66,98	33,02	0,00
7 - 12	0,42	99,58	0,00
13 - 15	0,00	99,03	0,97
16 - 18	0,00	79,84	20,16
19 - 24	0,35	21,99	77,66
25+	3,34	0,89	95,77

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Pada Tabel 3.2 terlihat bahwa partisipasi sekolah terfokus pada kelompok umur 7-18 tahun. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dengan strategi percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Meskipun demikian, persentase partisipasi sekolah tetap harus ditingkatkan karena pada tahun 2020 masih terdapat 1 dari 5 penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi. Dapat terlihat juga bahwa masih terdapat 3,34 persen penduduk usia 25 tahun ke atas yang tidak/belum pernah mengenyam pendidikan. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan terdahulu belum dapat menggapai seluruh lapisan masyarakat.

Sebesar 33,02 persen penduduk usia 6 tahun berstatus masih bersekolah. Hal tersebut menandakan bahwa sudah banyak penduduk usia 6 tahun yang mengikuti pendidikan SD/ sederajat, di mana rentang usia 6 sampai 7 tahun sudah dapat didaftarkan ke SD sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018. Sementara itu, partisipasi

sekolah kelompok umur perguruan tinggi 19-24 tahun hanya sekitar 21,99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi sekolah pada tingkat perguruan tinggi seharusnya menjadi prioritas perhatian pemerintah.

Selanjutnya, seiring dengan bertambahnya umur, penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi cenderung meningkat. Hal ini bisa disebabkan karena memang sudah menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan tertentu atau bisa juga karena ketidakmampuan untuk melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Keberhasilan pendidikan suatu bangsa akan menciptakan SDM unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi yang pada akhirnya menjadi generasi harapan bangsa, *engine of growth*, dan lokomotif pembangunan. Di sinilah peran penting penduduk usia sekolah 7-24 tahun dimana mereka menjadi bagian dari komposisi penduduk yang akan memanfaatkan peluang tersebut. Usia 7-24 tahun merupakan rentang usia sekolah, hendaknya mereka yang berada pada rentang usia tersebut masih aktif melakukan kegiatan bersekolah tanpa terkecuali.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah penduduk usia tertentu.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah, Kabupaten Kebumen, 2020

Karakteristik Demografi	Kelompok Umur			
	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	99,58	99,03	79,84	21,99
Jenis Kelamin				
Laki-laki	100,00	98,15	75,81	24,44
Perempuan	99,20	100,00	85,13	19,33
Tipe Daerah				
Perkotaan	98,61	100,00	92,63	23,70
Perdesaan	100,00	98,60	73,37	21,29

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa APS terbesar berada pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu 99,58 persen atau dapat dikatakan bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah. Semakin meningkat kelompok umur, APS semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia penduduk, partisipasi sekolahnya cenderung semakin menurun.

Menurut tipe daerah, APS untuk daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Dapat dilihat pula seiring bertambahnya usia, perbedaan APS perkotaan dan perdesaan semakin besar. Perbedaan terbesar berada pada kelompok umur 16-18 tahun yang merupakan usia yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tingkat SM/ sederajat, dengan perbedaan sekitar 19,26 persen.

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Jika jumlah populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai

jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK jenjang tersebut akan lebih dari 100. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya siswa yang masuk suatu jenjang sekolah terlalu dini dibandingkan usianya, atau sebaliknya, lebih lambat dibandingkan usianya, serta adanya pengulangan kelas oleh siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Kasar, Kabupaten Kebumen, 2020

Karakteristik Demografi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	108,57	90,69	103,71	13,69
Jenis Kelamin				
Laki-laki	108,54	94,13	97,12	11,04
Perempuan	108,59	86,88	112,37	16,56
Tipe Daerah				
Perkotaan	108,43	84,12	127,48	12,94
Perdesaan	108,63	93,60	91,68	14,04

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 3.4 memperlihatkan APK jenjang pendidikan SD/ sederajat sampai PT. APK jenjang pendidikan SD/ sederajat sebesar 108,57 persen, APK SMP/ sederajat sebesar 90,69 persen, APK SM/ sederajat sebesar 103,71 persen, dan APK untuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (Diploma/S1/S2/S3) sebesar 13,69 persen.

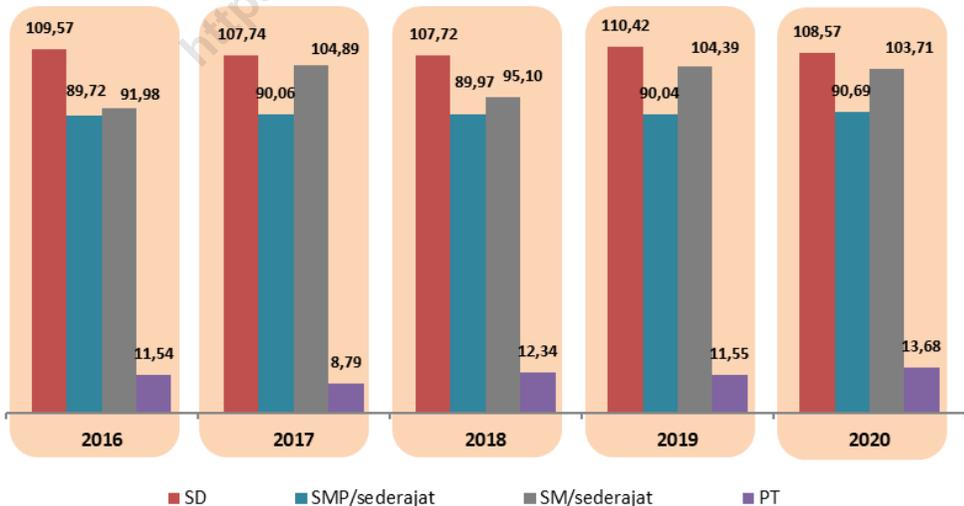
APK pada jenjang pendidikan SD/ sederajat melebihi angka 100 persen yang menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar kelompok umur 7-12 tahun. Dengan kata lain, murid SD yang bersekolah lebih banyak dibandingkan jumlah anak pada usia 7-12 tahun. Banyak hal bisa menjadi alasan, antara lain beberapa orang tua terkadang mendaftarkan anaknya yang belum mencapai usia 7 tahun langsung ke sekolah dasar

tanpa melewati PAUD terlebih dahulu, angka mengulang kelas yang masih tinggi, dan sebagainya.

Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Seharusnya sudah tidak ada lagi diskriminasi gender dalam memperoleh pendidikan di Indonesia seperti yang pernah terjadi puluhan tahun yang lalu. APK laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kebumen untuk tingkat SD sederajat hampir tidak terdapat perbedaan. Namun, pada jenjang SM/ sederajat dan Perguruan Tinggi, APK SM/ sederajat dan APK PT perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sedangkan pada jenjang SMP/ sederajat, APK laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Dalam kurun waktu lima tahun, terlihat bahwa pergerakan APK pada jenjang SD/ sederajat cenderung mengalami penurunan, tetapi APK SMP/ sederajat mengalami peningkatan, begitu juga APK jenjang SM/ sederajat dan PT juga cenderung mengalami peningkatan.

Gambar 3.1 APK menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Kebumen, 2016-2020



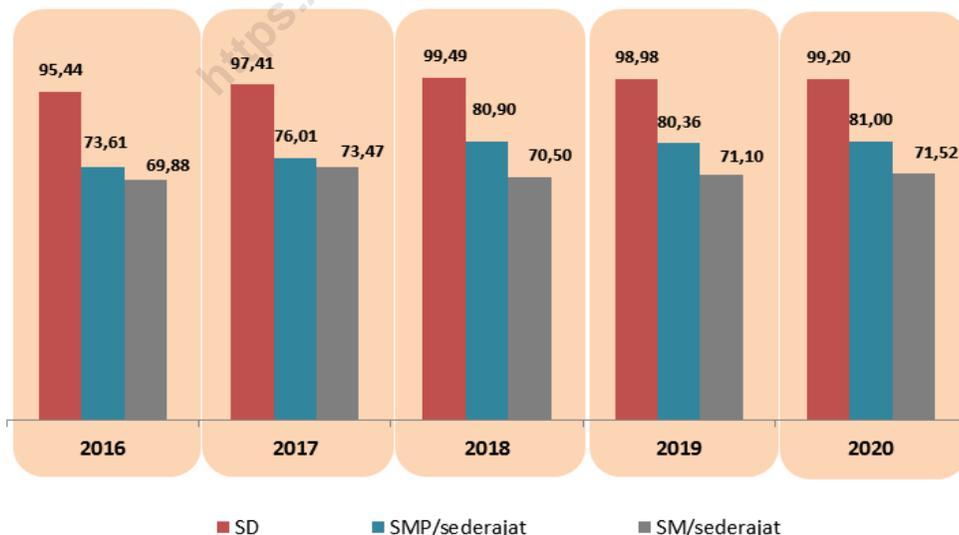
Sumber : BPS, Susenas Maret 2016-2020

Angka Partisipasi Murni

Indikator lain yang dihasilkan dalam publikasi ini adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Gambar 3.2 memperlihatkan APM jenjang pendidikan SD/ sederajat sampai dengan APM jenjang SM/ sederajat. APM pada setiap jenjang pendidikan masih belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya.

Gambar 3.2 APM menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Kebumen, 2016-2020



Sumber : BPS, Susenas Maret 2016-2020

Tabel 3.5, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pola APM memiliki kemiripan dengan pola APK. APM SD/ sederajat memiliki nilai paling tinggi yaitu 99,20 persen kemudian APM semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Berdasarkan gender, APM untuk setiap jenjang pendidikan laki-laki dan perempuan hampir sama, jika ada perbedaan selisihnya tidak lebih dari 7,13 persen. Menurut tipe daerah, APM daerah perkotaan dan perdesaan cenderung memiliki kesenjangan nilai yang semakin besar seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Kesenjangan paling tinggi terlihat pada jenjang pendidikan SM/ sederajat yaitu 84,59 persen berbanding 64,91 persen.

Tabel 3.5 Angka Partisipasi Murni, Kabupaten Kebumen, 2020

Karakteristik Demografi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	99,20	81,10	71,52	8,63
Jenis Kelamin				
Laki-laki	100,00	82,13	68,44	6,40
Perempuan	98,47	79,74	75,57	11,05
Tipe Daerah				
Perkotaan	100,00	78,66	84,59	9,27
Perdesaan	98,47	82,02	64,91	8,33

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Sesuai prinsip fundamental dan pengarusutamaan gender yang diusung dalam target pencapaian SDGs 2030, kesetaraan gender juga diperlukan dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan dasar. Rasio APM menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Rasio APM merupakan persentase APM perempuan terhadap APM laki-laki. Nilai rasio APM sebesar 100 persen menunjukkan APM perempuan sama dengan APM laki-laki, artinya kesetaraan gender sudah terwujud.

Tabel 3.6 memperlihatkan rasio APM pada masing-masing jenjang pendidikan. Rasio APM terendah terdapat pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat, yaitu 98,47 persen. Angka ini cenderung semakin meningkat seiring semakin tingginya jenjang pendidikan dengan rasio untuk jenjang SM/ sederajat 110,42 persen, dan untuk jenjang PT sebesar 172,66 persen.

Tabel 3.6 Rasio APM, Kabupaten Kebumen, 2020

Karakteristik Demografi	Rasio APM			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	98,47	97,09	110,42	172,66

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Nilai Rasio APM pada jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat belum mencapai angka 100. Sementara itu, nilai Rasio APM untuk jenjang pendidikan SM/ sederajat dan PT sudah melampaui angka 100 persen artinya, tidak ada perbedaan baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan yang bersekolah tepat waktu di setiap jenjang pendidikan SM/ sederajat dan PT. Secara umum, seiring meningkatnya tingkat pendidikan, persentase perempuan yang bersekolah tepat waktu lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.

Bab 4. Hasil dan Capaian Proses Pendidikan

Pembangunan pendidikan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar. Dengan kebijakan ini diharapkan seluruh rakyat Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan bermutu tinggi yang dicirikan dengan: (1) angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan; (2) hasil pembelajaran berkualitas; dan (3) mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi (Kemendikbud, 2020).

Dalam bab ini, indikator terkait pembangunan pendidikan yang akan dibahas antara lain: Angka Melek Huruf (AMH), tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan rata-rata lama sekolah.

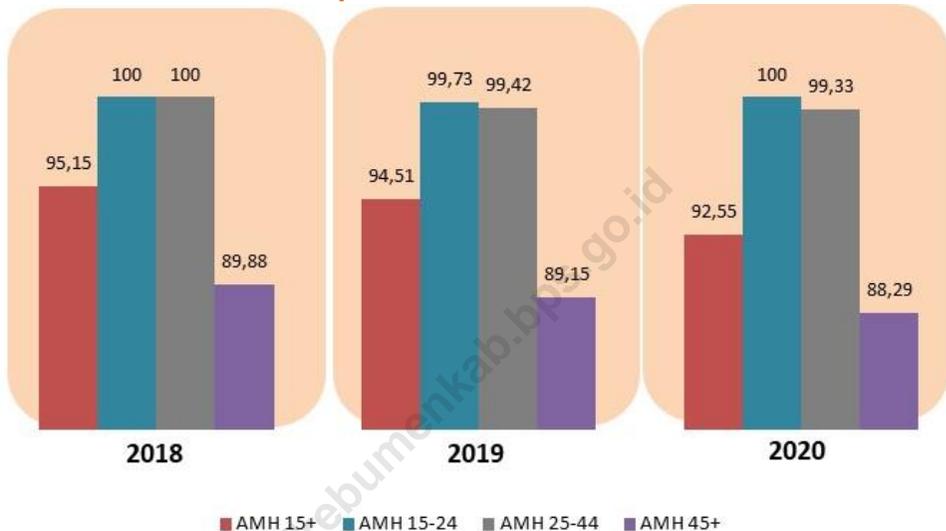
Angka Melek Huruf

Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Dengan kemampuan baca-tulis yang baik, maka akses terhadap pengetahuan semakin terbuka. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (AMH). AMH dapat diinterpretasikan sebagai seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk membaca dan menulis sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Pengetahuan dan keterampilan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Selain itu, AMH merupakan salah satu indikator yang menjadi target SDGs pada pilar Sosial, yaitu target 4.6. Implikasi dari

ditetapkannya AMH sebagai indikator SDGs adalah pada tahun 2030 ditargetkan semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Gambar 4.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Kabupaten Kebumen, 2018-2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

Pada tahun 2020, AMH usia 15 tahun ke atas mencapai 92,55 persen. Dibandingkan AMH kelompok umur 15-24 tahun (100 persen) dan kelompok umur 15-59 (99,33 persen), AMH usia 45 tahun ke atas merupakan yang terendah. Hal ini disebabkan karena kelompok umur 45 tahun ke atas mencakup penduduk lanjut usia yang sulit terjangkau pelaksanaan program keaksaraan fungsional dimana program ini dikhususkan bagi penduduk usia 15-59 tahun.

Berdasarkan Gambar 4.1, terlihat bahwa dari tahun 2018-2020 terjadi penurunan AMH untuk kelompok umur 15 tahun ke atas. Sementara itu, untuk ketiga kelompok umur lainnya selama 3 tahun terakhir cenderung stagnan. Salah satu kemungkinan penyebab stagnasi nilai AMH ini adalah nilai AMH yang sudah sangat tinggi.

Sehingga, dibutuhkan kerja ekstra untuk meningkatkan AMH dengan menjangkau kelompok marginal seperti penduduk penyandang disabilitas, penduduk yang tinggal di perdesaan, atau penduduk miskin dalam program pengentasan buta aksara.

Tabel 4.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik, Kabupaten Kebumen, 2020

Karakteristik Demografi	Kelompok Umur			
	15+	15-24	25-44	45+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	92,55	100,00	99,33	88,29
Jenis Kelamin				
Laki-laki	93,15	100,00	99,65	91,45
Perempuan	91,96	100,00	99,03	85,35
Tipe Daerah				
Perkotaan	94,60	100,00	99,96	92,92
Perdesaan	91,59	100,00	99,04	86,13

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada keempat kelompok umur terdapat pola yang sama untuk tiap karakteristik. Kelompok penduduk yang memiliki AMH lebih rendah adalah penduduk yang tinggal di daerah perdesaan dan penduduk berjenis kelamin perempuan. Mengingat bahwa prinsip utama SDGs adalah *"no one left behind"*, maka kemampuan literasi keempat kelompok penduduk tersebut perlu menjadi fokus pemerintah. Budaya literasi perlu digencarkan, digalakkan, diperluas gaungnya di seluruh Indonesia. Tidak hanya dalam hal literasi baca-tulis namun juga literasi dasar lainnya yaitu literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan. Oleh karena itu, budaya literasi sudah sepatutnya menjadi perhatian kita bersama untuk kemajuan bangsa dan Negara kita. Pengembangan dan penguatan karakter serta kegiatan literasi menjadi salah satu unsur penting dalam kemajuan negara dalam menjalani kehidupan di era globalisasi (Kadiwanu, 2019).

Tabel 4.2 Rasio Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah, Kabupaten Kebumen, 2020

Tipe Daerah	Rasio Angka Melek Huruf
(1)	(2)
Perkotaan + Perdesaan	0,99
Perkotaan	1,00
Perdesaan	0,98

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

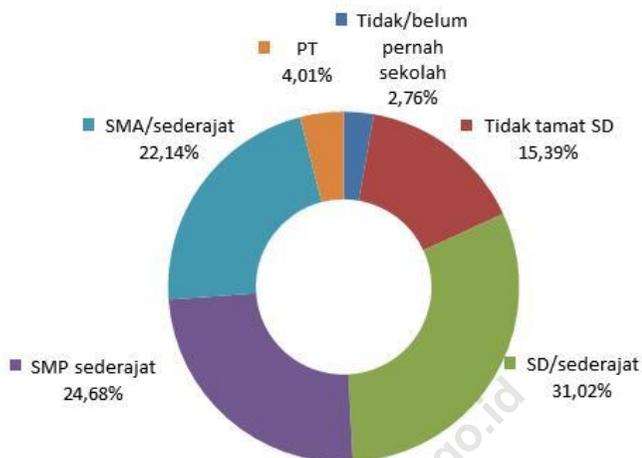
Rasio Angka Melek Huruf (AMH) adalah perbandingan AMH antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki. Rasio AMH yang bernilai 1 merupakan kondisi ideal dimana tidak terdapat perbedaan AMH antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki. Apabila rasio AMH semakin menjauhi nilai 1, maka semakin timpang AMH antar jenis kelamin.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa rasio AMH penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2020 adalah 0,99. Dengan kata lain, AMH antara laki-laki dan perempuan sedikit timpang dimana AMH perempuan sedikit lebih rendah dibandingkan AMH laki-laki. Jika dilihat dari tipe daerah, ketimpangan AMH di perdesaan sedikit lebih lebar dibandingkan ketimpangan AMH di perkotaan (0,98 berbanding 1).

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kebumen didominasi oleh pendidikan menengah. Dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, 22 orang telah menamatkan SM/ sederajat dan hanya 4 orang yang menamatkan Perguruan Tinggi (PT).

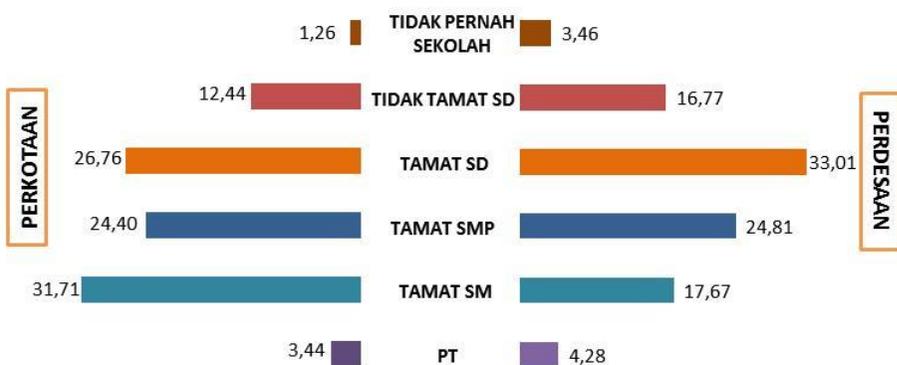
Gambar 4.2 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%), Kabupaten Kebumen, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, terdapat perbedaan pola pendidikan tertinggi yang ditamatkan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Di daerah perkotaan, penduduk usia 15 tahun ke atas didominasi oleh tamatan SM/ sederajat (31,71 persen). Sedangkan, penduduk di perdesaan didominasi tamatan SD/ sederajat (33,01 persen).

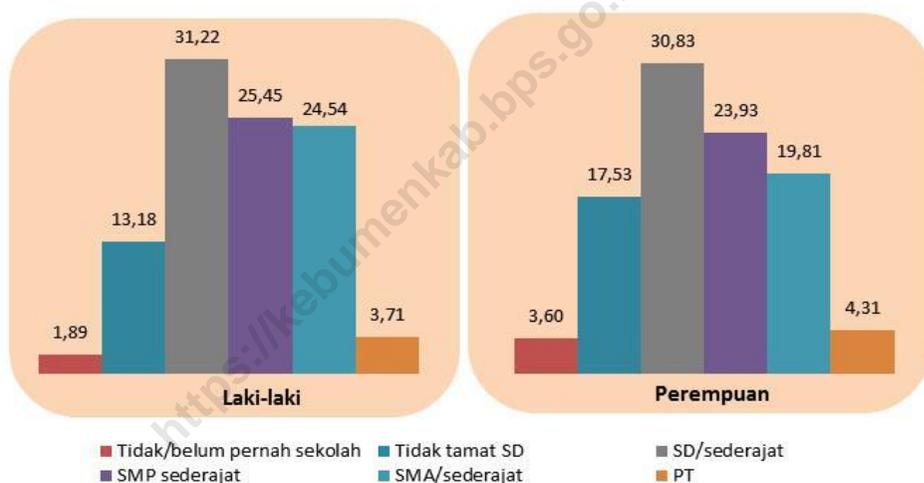
Gambar 4.3 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%) Menurut Tipe Daerah, Kabupaten Kebumen, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan yang belum/tidak pernah mengenyam pendidikan atau belum tamat SD sebesar 21,13 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang sebesar 15,07 persen. Persentase perempuan yang menamatkan pendidikan SMP/MTs ke atas (SMP/MTs, SM/MA, dan PT) sebesar 48,05 persen, lebih rendah dibandingkan laki-laki sebesar 53,70 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Gambar 4.4 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%) Menurut Jenis Kelamin, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

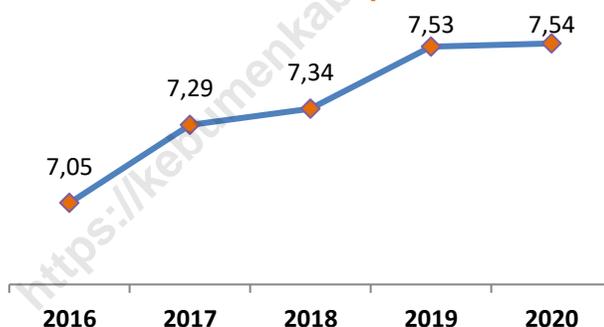
Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator yang menjadi sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Penghitungan rata-rata lama sekolah

menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun, dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Gambar 4.5 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas, Kabupaten Kebumen, 2016-2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2016-2020

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2020 mencapai 7,54 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk umur 25 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 1 SMP (kelas VII) atau putus sekolah di kelas 2 SMP (Kelas VIII). Selama 5 tahun terakhir rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan walaupun belum signifikan, masih dikisaran 7 tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan mengalami peningkatan.

Daftar Pustaka

- Bappenas. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Jakarta : Bappenas.
- Kadiwanu, Agriani Stevany. (2019). *Gerakan Literasi Nasional, Gerakan Bersama Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Diakses pada 5 Agustus 2021, dari <https://bppauddikmasntt.kemdikbud.go.id/index.php/sistem-informasi/11-artikel/70-gerakan-literasi-nasional-gerakan-bersama-demi-mencerdaskan-kehidupan-bangsa>.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta : Sekretariat Negara RI.
- _____. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta : Sekretariat Negara.
- _____. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Jakarta : Sekretariat Negara.
- _____. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- _____. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang Sederajat. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2020). Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

_____. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

www.flaticon.com

www.free-powerpoint-templates-design.com

<https://kebumenkab.bps.go.id>

Catatan Teknis

Susenas merupakan survei rumah tangga dengan cakupan variabel yang sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. Pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Kor (dilaksanakan setiap tahun) dan Modul (3 tahun sekali) yang meliputi Modul Ketahanan Sosial, Modul Kesehatan dan Perumahan, serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan secara bergantian. Pelaksanaan Susenas mulai tahun 2015 dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Maret dan September.

Pelaksanaan Susenas Maret 2020 mencakup 787 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen. Pencacahan bulan Maret dengan jumlah sampel besar menghasilkan data yang representatif untuk estimasi sampai dengan tingkat kabupaten/kota, sedangkan pencacahan bulan September dengan ukuran sampel kecil hanya bisa menghasilkan data yang representatif untuk estimasi provinsi dan nasional.

Tipe Daerah Tempat Tinggal menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses kefasilitas perkotaan.

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rasio Murid-Guru adalah gambaran jumlah murid terhadap jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu.

Biaya Pendidikan adalah semua biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan, baik yang sudah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan (berupa uang atau barang) untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan responden.

Bantuan Pendidikan adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang bukan karena prestasi, baik berupa uang atau barang, seperti : Beasiswa Miskin, Bantuan Pendidikan dari PNPM (buku, sepatu, uang transport), beasiswa yang diperoleh karena tugas belajar dan sekolah ikatan dinas. Sumber beasiswa/bantuan pendidikan bisa berasal dari BSM (Bantuan Siswa Miskin; bantuan/beasiswa pemerintah lainnya; lembaga non pemerintah; sekolah maupun perorangan).

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/SDLB/MI/ sederajat, SMP/SMPLB/MTs/ sederajat, SM/SMLB/MA/ sederajat dan PT.

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Tamat Sekolah adalah jika responden telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Tidak Punya Ijazah SD adalah kepala ruta/anggota ruta yang tidak memiliki ijazah suatu jenjang pendidikan atau pernah bersekolah di Sekolah Dasar atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, Paket A1-A100, Paket A Setara SD) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga kepala ruta/anggota ruta yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat.

Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) adalah Sekolah Dasar atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, dan/atau sekolah dasar pamong).

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) adalah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat (MULO, HBS 3 tahun, dan Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama).

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), atau yang sederajat (Sekolah Menengah Luar Biasa, HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA)).

Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah sekolah umum berciri khas Islam yang sederajat dengan SD.

Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah sekolah umum berciri khas Islam yang sederajat dengan SMP.

Madrasah Aliyah (MA) adalah sekolah umum berciri khas Islam yang sederajat dengan SMA.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olah Raga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, dan Sekolah Penata Rontgen.

Program Diploma 1/2 adalah program D1/D2 pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program Diploma 1/2 pada pendidikan formal. Program Diploma 1 hanya program diploma pada pendidikan formal yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi.

Program Diploma 3/Sarjana Muda adalah program D3 atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjanamuda.

Program Diploma 4/Sarjana adalah program pendidikan Diploma 4 atau Strata 1 pada suatu perguruan tinggi.

S2/S3 adalah program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), strata 2 atau 3 pada suatu perguruan.

Paket A/B/C merupakan pendidikan kesetaraan dengan tujuan memperluas akses pendidikan dasar sembilan tahun melalui program Paket A dan Paket B serta pendidikan menengah melalui program Paket

C. Menurut UU No.20 tahun 2003 pasal 26 ayat, pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yg mencakup Paket A Setara SD/MI, Paket B Setara SMP/MTs, dan Paket C Setara SMA/MA.

Tidak/Belum Pernah Sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih Bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Tidak Bersekolah Lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Rasio APM (SD/SMP/SM) adalah perbandingan APM murid/mahasiswa perempuan terhadap APM murid/ mahasiswa laki-laki pada tiap jenjang dan jalur pendidikan, dinyatakan dalam persentase.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruflainnya.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernahtinggal kelas atau tidak.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://kebumenkab.bps.go.id>

ISBN 978-623-6248-12-6



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEBUMEN**

Jl. Arungbinang No.17A Kebumen. 54311 Telp/Fax: (0287) 381163
Homepage : <http://kebumenkab.bps.go.id> Email : bps3305@bps.go.id